

Digitimes #49
Februari 2025

ANALISIS SENTIMEN PUBLIK TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TANPA PERSIAPAN: STUDI KASUS LARANGAN PENGECER LPG 3 KG



CfDS
CENTER FOR DIGITAL SOCIETY

Room BC 201-203
Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Gadjah Mada
Jalan Socio Yustisia 1, Bulaksumur, Yogyakarta
(0274) 563362, Ext. 116 | cfds.fisipol@ugm.ac.id



RESEARCHER AND CONTRIBUTORS

Authors

Afra Hanifah Prasastisiwi
Nadia Sinta Rindiani

Data Scientist

Fathin Difa Robbani

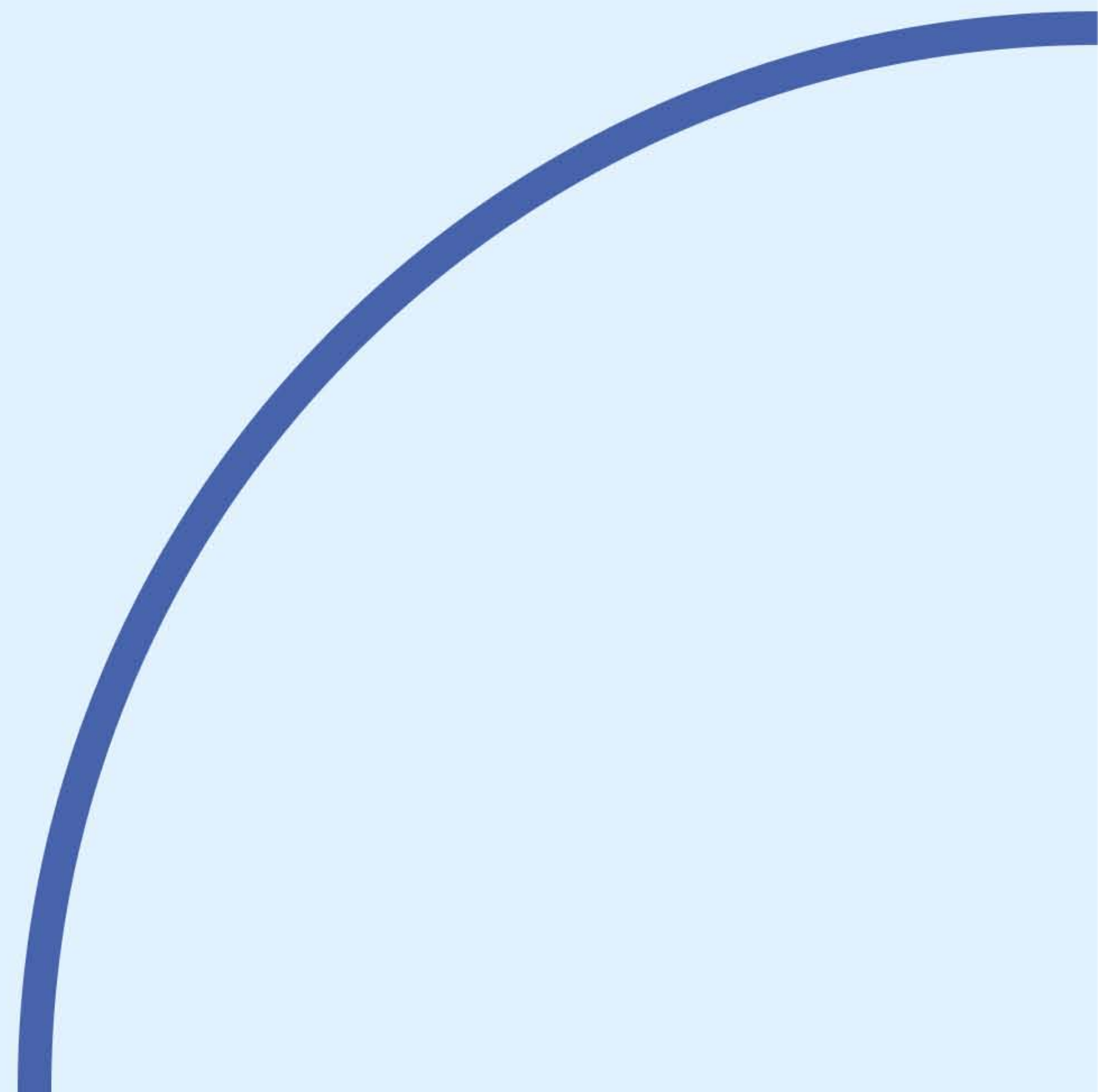
Editor

Achmed Faiz Yudha Siregar

Designer and Layouter

Hanny Handayani

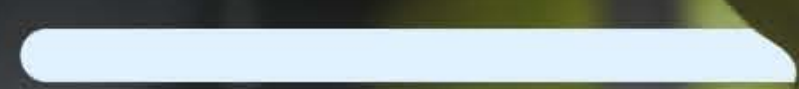
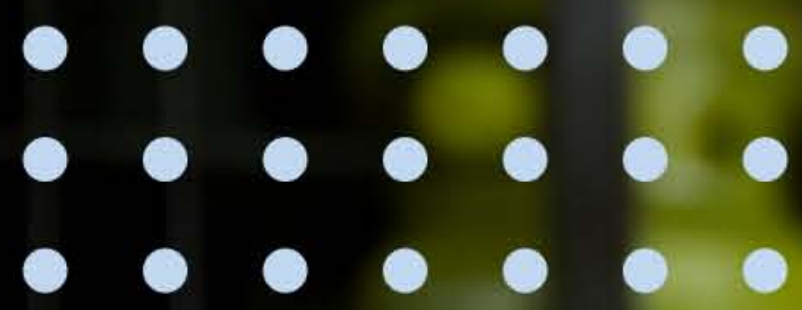
Februari 2025



DAFTAR ISI

2	Pendahuluan
5	Rumusan Masalah
6	Kajian Literatur
10	Kerangka Analisis dan Metodologi Penelitian
12	Pembahasan
24	Kesimpulan
25	Daftar Pustaka

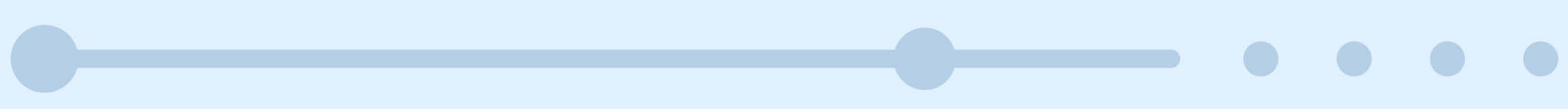




→ PENDAHULUAN

Pada 1 Februari 2025 lalu, kementerian ESDM secara resmi memberlakukan larangan penjualan gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) subsidi 3 Kilogram (kg) melalui pengecer. Implementasi kebijakan ini terkesan mendadak, dengan pemberitahuan pertamanya di 31 Januari melalui pernyataan wakil menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung (Media Indonesia, 2025). Penjualan LPG 3 kg atau yang dikenal sebagai “Gas Melon” kemudian hanya diizinkan melalui sub penyalur resmi Pertamina (Media Indonesia, 2025; BBC News, 2025). Kebijakan ini memicu berbagai kontroversi karena LPG 3 kg sendiri telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah di Indonesia. Akibat dari pembatasan yang ada, masyarakat dan pedagang kecil berbondong-bondong memburu LPG 3 kg ke pangkalan resmi. Masalah utama yang dikeluhkan yakni panjangnya antrean, lokasi sub penyalur yang jauh, hingga keterbatasan persediaan yang membuat LPG 3 kg kemudian dianggap langka.

Dari sisi pemerintah, kebijakan distribusi LPG 3 kg yang baru diberlakukan dengan harapan alokasi anggarannya dapat tepat sasaran. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa harga satu tabung maksimal hanya Rp20.000, tetapi dapat dijual oleh pengecer hingga Rp30.000, menciptakan rentang yang cukup besar di tingkat konsumen (Tempo, 2025; Kompas Media, 2025).



Selain menyatakan alasan tersebut, Bahlil juga mengisyaratkan jika beban pemerintah mengenai subsidi LPG 3 kg ini cukup besar dengan mempersoalkan tentang harga tabung yang tidak berubah sejak 20 tahun lalu dan membandingkan kurs dolar tahun 2007 seharga Rp8.000, sementara kini telah mencapai Rp16.000 (Tempo, 2025). Sayangnya, implementasi kebijakan yang mendadak sulit diterima oleh masyarakat, terbukti dari kondisi agen-agen penyalur resmi yang tidak kondusif diserbu warga. Bahkan, terdapat kasus meninggalnya dua warga—Yonih (62 tahun) dan Tri Lestari (48 tahun)—yang dikaitkan dengan sulitnya mendapat LPG 3 kg, mencerminkan betapa gentingnya situasi di lapangan (Detik, 2025; Narasi TV, 2025a).

Polemik subsidi LPG di awal tahun 2025 ini terbilang cukup unik, karena menghadirkan dinamika timbal balik antara respons masyarakat dan kebijakan pemerintah. Ricuhnya keadaan lapangan saat pemberlakuan aturan 1 Februari lalu membuat pemerintah mendapat keluhan dari banyak pihak termasuk agen penyalur resmi, pengecer, dan konsumen. Agen penyalur resmi kewalahan menghadapi serbuan warga, sementara pengecer merasa dirugikan akibat berkurangnya sumber pendapatan. Di sisi lain, konsumen mengeluhkan sulitnya akses, antrean panjang, hingga adanya korban jiwa.

Berdasar pada keadaan di lapangan, banyak pula warga yang mengadukan kesulitannya di media sosial. Bentuk perhatian masyarakat di media sosial memiliki ciri khas tersendiri, misalnya dengan sorotan viral dengan sentuhan rasa iba terhadap warga yang harus mengantre lama (Sketsa Nusantara, 2025). Belum lagi beberapa komentar warganet di kanal media sosial X menunjukkan reaksi keras terhadap kebijakan ini. Salah satu pengguna menulis, *"Korban kedua gara-gara ulah Prabowo dan Bahlil. Mau bunuh berapa orang lagi, Pak?"* kemudian komentar lain berbunyi, *"Terima kasih Prabowo, terima kasih Bahlul eh Bahlil. Kalian kok suka banget membunuh orang sih?"* (Fajar, 2025). Gelombang respon negatif ini membuat nama Bahlil Lahadalia menjadi sorotan publik dan trending di X, dengan lebih dari 634.000 cuitan di tanggal 3-4 Februari berdasarkan data dari Trends24 (Kontan, 2025).



Menanggapi riuhnya situasi lapangan, Presiden mengeluarkan pernyataan yang disampaikan melalui Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bahwa per 4 Februari, kementerian ESDM diperintahkan untuk mencabut kebijakan larangan pengecer sebelumnya (Narasi TV, 2025b). Kemudian, Menteri ESDM secara resmi mengeluarkan pernyataan bahwa kebijakan ini dicabut hanya dalam kurun waktu tiga hari sejak diberlakukan (Kumparan, 2025). Untuk level regulasi pusat, perubahan kebijakan dan implementasinya ini terhitung sangat cepat.

Menurut OCP Policy Center (2017), kegagalan implementasi kebijakan sering kali disebabkan oleh faktor seperti ambiguitas kebijakan, kurangnya koordinasi dalam implementasi, serta keterbatasan sumber daya dan konflik politik. Keempat aspek tersebut akan menjadi dasar teori dalam melihat persoalan ini, terutama dalam memahami mengapa kebijakan larangan penjualan LPG 3 kg di pengecer mengalami kegagalan implementasi dalam waktu singkat.

Dengan memahami faktor-faktor yang sering menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan, dapat terlihat bahwa persoalan dalam kebijakan larangan penjualan LPG 3 kg di pengecer tidak hanya muncul dari reaksi spontan masyarakat, tetapi juga dari tantangan struktural dalam distribusi subsidi. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah bertanggung jawab merancang kebijakan publik yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kebijakan yang diberlakukan pada 1 Februari lalu telah memicu reaksi publik yang luas, terutama di media sosial, khususnya X. Hal ini menunjukkan urgensi untuk memahami respons timbal balik antara masyarakat dan pemerintah, yang dapat menjadi acuan bagi penelitian serta perumusan kebijakan kedepannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur respons publik terhadap kebijakan pembatasan distribusi LPG 3 kg dengan menggunakan analisis sentimen, khususnya pada percakapan di X. Kualitas kepuasan dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial. Analisis sentimen dalam hal ini dapat membantu memahami opini publik dengan mengklasifikasikan tweet menjadi sentimen positif, negatif, atau netral. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan analisis sentimen untuk mengukur respons publik terhadap kebijakan pembatasan distribusi LPG 3 kg, dengan fokus pada percakapan di X mengenai kebijakan tersebut. Hasil analisis ini dapat memberikan gambaran real-time mengenai persepsi masyarakat, sehingga pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika di lapangan.



→ RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pola sentimen publik terhadap implementasi kebijakan pembatasan pengecer LPG 3 kg yang berkembang di media sosial?
2. Bagaimana implementasi kebijakan yang efektif dapat dirumuskan berdasarkan sentimen publik terhadap isu LPG 3 kg?



→ KAJIAN LITERATUR

→ Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg di Indonesia

Gas alam dan turunannya merupakan sumber energi primer ketiga yang paling banyak digunakan di Indonesia setelah minyak bumi dan batu bara. Gas alam atau gas bumi ini memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, mulai dari sektor perindustrian, pembangkit listrik, komersil, hingga kebutuhan sehari-hari. Salah satu bentuk konversi gas alam yang paling banyak digunakan masyarakat di Indonesia adalah *Liquefied Petroleum Gas* (LPG). LPG, ditinjau dari sifatnya merupakan gas alam yang tidak memiliki bau, tidak berwarna, tidak berasa, mudah terbakar dan memiliki tingkat racun yang sangat sedikit. LPG sendiri di Indonesia banyak digunakan sebagai bahan bakar memasak rumah tangga (Budya & Yasir, 2011).

Sejak pemerintah meluncurkan program konversi minyak tanah ke LPG pada tahun 2008, konsumsi LPG di Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Pada periode 2016 - 2022, pertumbuhan rata-rata konsumsi LPG mencapai 4,36% per tahun. Pertumbuhan konsumsi LPG ini didorong oleh perluasan wilayah konversi minyak tanah menjadi LPG serta peningkatan kebutuhan masyarakat (Kementerian Keuangan, 2020). Namun, peningkatan permintaan LPG domestik ini tidak diimbangi dengan peningkatan produksi LPG dalam negeri, sehingga impor menjadi solusi utama. Pada tahun 2016, permintaan LPG dalam negeri mencapai 6,64 juta ton, dengan hanya 2,22 juta ton dari produksi domestik dan sisanya 66,80% atau 4,48 juta ton dipenuhi dari impor.

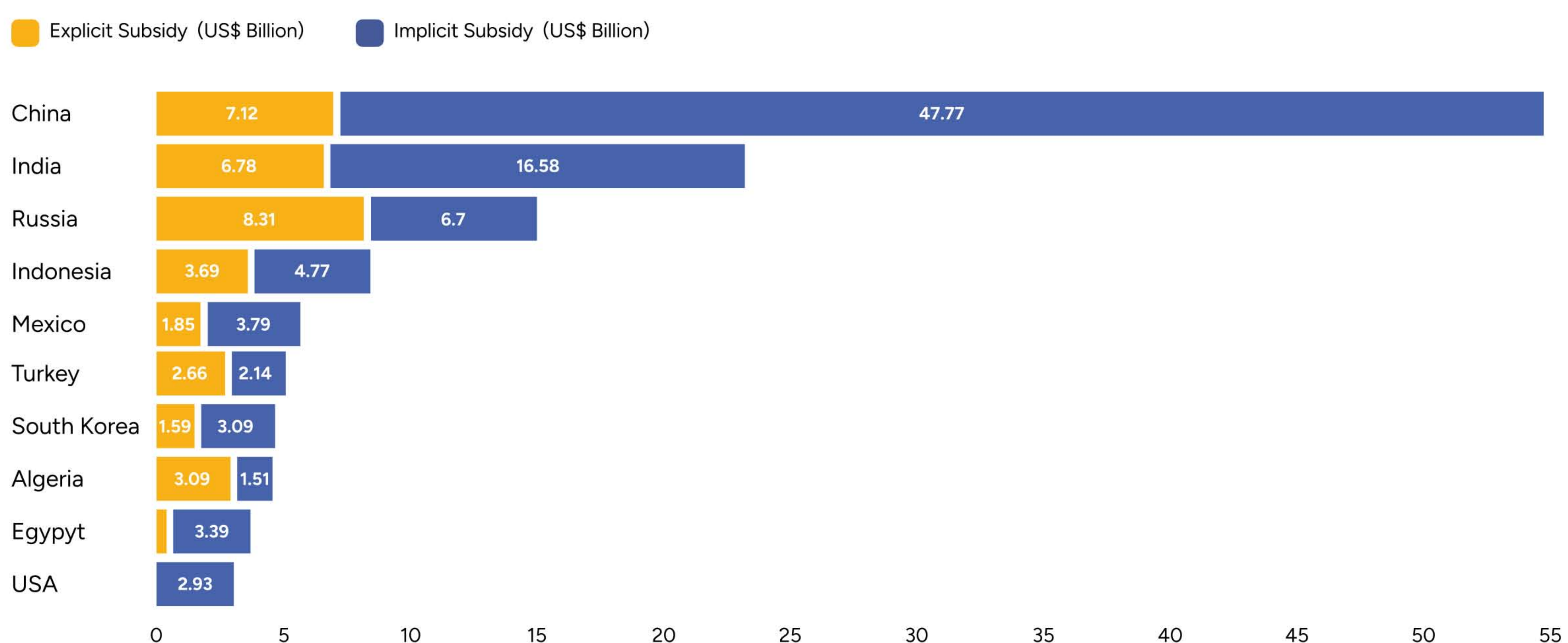
Sementara itu, permintaan LPG pada tahun 2022 meningkat mencapai 8,56 juta ton, tetapi produksi dalam negeri justru turun menjadi 1,98 juta ton, sehingga 6,74 juta ton sisanya harus diimpor.



Ketergantungan terhadap impor yang tinggi ini tidak hanya mengancam ketahanan dan kemandirian energi nasional, tetapi juga berpotensi memperburuk neraca perdagangan dan menekan cadangan devisa (Mesagan et al., 2022).

Subsidi energi, termasuk LPG telah menjadi beban yang signifikan dalam anggaran negara. Pada tahun 2019, total belanja subsidi energi mencapai Rp 136,9 triliun dengan subsidi LPG menyumbang sekitar Rp 54 triliun, atau 40% dari total subsidi energi (Kementerian Keuangan, 2020). Indonesia juga termasuk dalam salah satu negara pemberi subsidi LPG terbesar di dunia dan menempati peringkat ke-4 sepanjang 2022 (Black, 2023). Berikut adalah perbandingan posisi Indonesia dalam daftar 10 negara dengan subsidi LPG terbesar di dunia.

Gambar 1. Negara-negara dengan subsidi LPG terbesar di dunia tahun 2022



Sumber: IMF

Berdasarkan data IMF di atas, tercatat bahwa nilai subsidi LPG di Indonesia mencapai US\$8,47 miliar, terdiri dari subsidi eksplisit US\$3,69 miliar dan subsidi implisit US\$4,77 miliar (Black, 2023). Angka tersebut tergolong besar dibandingkan negara-negara lain di dunia, menguatkan pernyataan Menteri ESDM bahwa subsidi LPG membebani fiskal pemerintah secara substansial.

Selain berdampak negatif terhadap anggaran publik, sistem distribusi LPG di Indonesia juga terbilang tidak efisien, kurangnya pengawasan dalam penyaluran tabung LPG 3 kg menyebabkan subsidi seringkali tidak tepat sasaran (Wiratmadja et al., 2016). Di Indonesia, LPG tersedia dalam tiga ukuran tabung, yaitu 3 kg, 5,5 kg, dan 12 kg. Harga LPG 3 kg tetap stabil sejak 2008 karena disubsidi, sedangkan harga LPG 5,5 kg dan 12 kg berubah dari waktu ke waktu untuk mengikuti harga pasar internasional, karena tidak mendapatkan subsidi (TNP2K, 2020). Adanya selisih harga ini telah mendorong banyak konsumen, termasuk dari kelompok berpenghasilan tinggi, beralih ke LPG 3 kg. Padahal menurut Undang-Undang Energi Indonesia (2007), subsidi energi seharusnya diperuntukkan hanya bagi kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan akses mereka terhadap energi.

➔ **Hubungan antara Isu LPG 3 Kg dengan Konsep Implementasi Kebijakan**

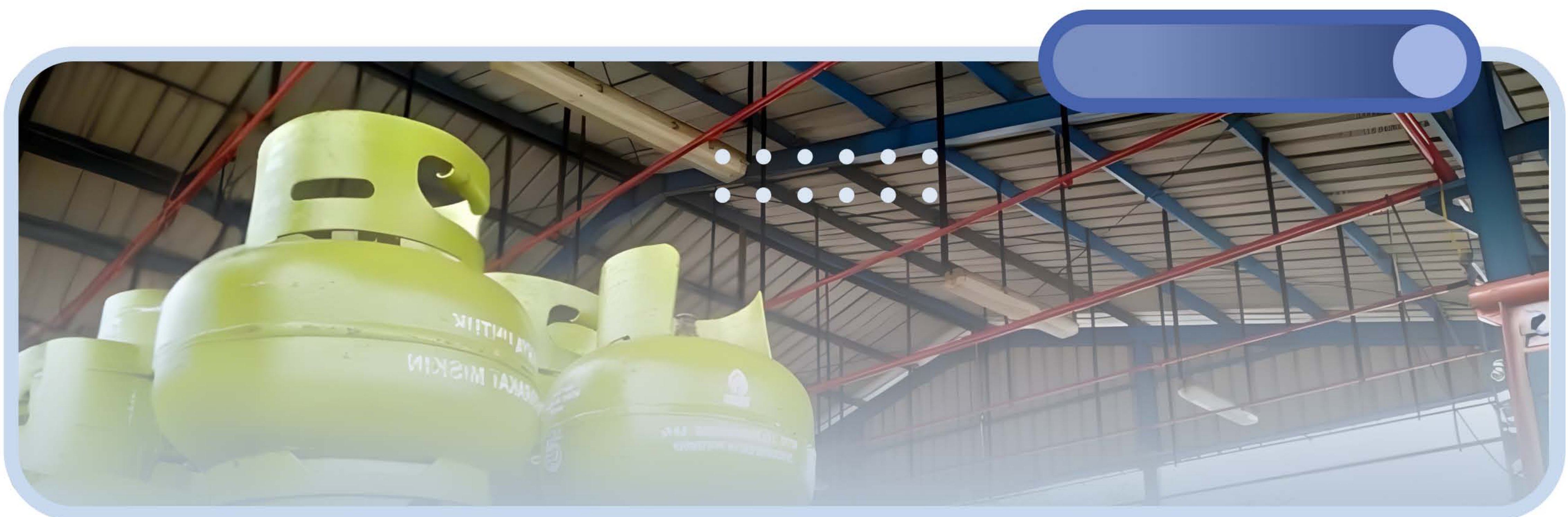
Merangkum konsep implementasi kebijakan yang diuraikan oleh OCP Policy Center (2017) dan Judijanto (2024), terdapat empat faktor yang memungkinkan suatu implementasi kebijakan dianggap ideal sesuai dengan tuntutan kesejahteraan masyarakat. Faktor pertama, tidak ada ambiguitas. Sayangnya, penyaluran subsidi LPG bagi kelompok miskin pada dasarnya sudah merupakan masalah fundamental dari ambiguitas kebijakan LPG, jauh sebelum implementasi regulasi 1 Februari dijalankan. Ketidakjelasan definisi masyarakat miskin menyebabkan banyaknya celah penyalahgunaan, sehingga banyak pihak yang mencari celah dan subsidi LPG 3 kg rentan salah sasaran (Kumparan, 2025).

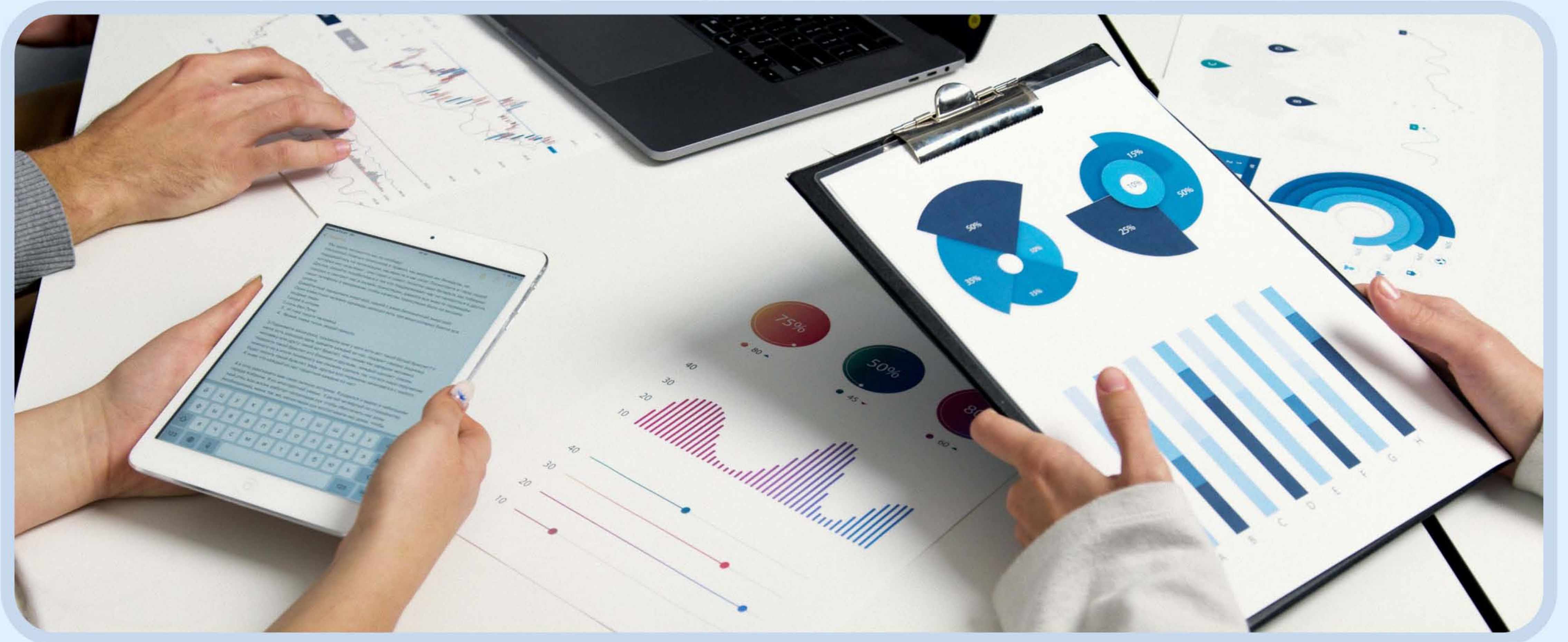
Selanjutnya, faktor kedua mengenai pentingnya koordinasi dalam implementasi atau yang OCP sebut sebagai Implementers at the Front Lines. Faktor ini terutama berlaku dalam implementasi kebijakan baru terkait pelarangan pengecer LPG 3 kg yang diberlakukan oleh Kementerian ESDM, tetapi kemudian dibatalkan oleh presiden setelah mendapat aduan dari masyarakat (Narasi TV, 2025b). Hal ini menunjukkan kurangnya koordinasi yang baik antara Kementerian ESDM sebagai pelaksana kebijakan di lapangan dan presiden sebagai pemegang otoritas tertinggi di pemerintah pusat.

Faktor ketiga yaitu pertimbangan akan keterbatasan sumber daya. Pemerintah mungkin mengira bahwa masyarakat bisa langsung beralih membeli LPG 3 kg dari agen resmi, faktanya tidak semua orang punya akses mudah ke agen tersebut. Ini menyebabkan ketimpangan distribusi dan ricuhnya antrean masyarakat di pusat-pusat penyalur resmi. Pemerintah bahkan baru menyadari hal ini setelah kebijakan ini dihubungkan dengan adanya korban jiwa (Detik, 2025; Narasi TV, 2025a).

Faktor keempat yang tak kalah penting adalah perlunya adaptasi kebijakan terhadap konteks lokal tanpa didominasi oleh kepentingan politik tertentu. Sejalan dengan faktor sebelumnya, proses adaptasi kebijakan dalam kasus ini tampaknya kurang matang dan terkesan mendadak, memicu kecurigaan masyarakat terhadap kemungkinan agenda tersembunyi. Hal ini semakin diperkuat oleh absennya uji coba sebelum implementasi, di mana kebijakan larangan LPG 3 kg langsung diberlakukan hanya sehari setelah pengumuman pada 31 Januari. Menanggapi situasi ini, Bahlil secara terbuka mengakui perlunya pemberlakuan secara bertahap yang disampaikannya pada 8 Februari di Kantor DPP Golkar (Kumparan, 2025).

Keempat faktor di atas akan menjadi dasar konsep untuk melihat sentimen publik terhadap kasus kebijakan tiga hari larangan pengecer LPG 3 Kg. Titik tengah dari konsep-konsep implementasi kebijakan yang ideal bagi kesejahteraan masyarakat ini dinilai sesuai sebagai kerangka konseptual guna membaca kasus ini, terutama melihat pihak-pihak yang bersinggungan dengan isu subsidi LPG merupakan kelompok menengah ke bawah yang rentan akan ketidakadilan regulasi dan membutuhkan perhatian khusus. Karena pada dasarnya, kebijakan publik bukan hanya soal perencanaan, tetapi juga pelaksanaan yang matang, evaluasi berkelanjutan, dan kerja sama berbagai pihak untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Judijanto, Yumame and Pugu, 2024).





➔ **Kerangka Analisis dan Metodologi Penelitian:**

➔ **Analisis Sentimen**

Dalam menelusuri dinamika percakapan terkait larangan pengecer LPG 3 Kg di platform X, penggabungan antara Social Network Analysis (SNA) dan Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT) digunakan pada penelitian ini. SNA dipakai untuk memetakan interaksi antar aktor, memvisualisasikan kluster wacana, dan mengidentifikasi jenis percakapan yang berkembang organik atau terdapat pola komunikasi terstruktur (Azmi et al., 2021). Sementara, BERT digunakan untuk mengklasifikasi sentimen dalam percakapan publik dengan lebih akurat. Model ini mampu menangkap konteks bahasa, membedakan antara sentimen positif, negatif, dan netral (Sahoo et al., 2023).

Kombinasi SNA dan BERT memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami percakapan digital. SNA membantu mengungkap struktur jaringan komunikasi dan aktor kunci yang memengaruhi persebaran isu, sedangkan BERT memberikan wawasan mendalam mengenai sentimen dan narasi yang berkembang. Dengan perpaduan ini, hasil studi dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola penyebaran informasi dan sentimen publik, serta mendeteksi kemungkinan adanya aktor tertentu dalam membentuk arus diskusi.



➔ Pengumpulan Data dan Analisis Data

Data penelitian ini dikumpulkan dari Twitter/X menggunakan kata kunci yang relevan dengan kebijakan LPG 3 kg, yang diposting pada tanggal 30 Januari – 11 Februari 2025. Rentang waktu ini dipilih untuk menangkap berbagai reaksi publik, mulai dari sebelum adanya kebijakan pembatasan pengecer LPG 3 kg diberlakukan hingga pembatalannya.

Setelah data diperoleh, tahap pra-pemrosesan dilakukan untuk membersihkan informasi yang tidak relevan, seperti URL, nama pengguna, hashtag tambahan, dan kata-kata berhenti. Data yang telah dibersihkan kemudian dianalisis menggunakan model BERT untuk mengklasifikasikan polaritas sentimen, dengan evaluasi akurasi model sebagai ukuran kinerjanya. Selanjutnya, teknik visualisasi seperti word cloud, pemodelan topik, dan analisis bigram diterapkan untuk menggali lebih dalam pola percakapan publik. Hasil pemodelan bigram divisualisasikan menggunakan SNA untuk mengidentifikasi hubungan antar istilah dan frasa kunci dalam diskusi terkait LPG 3 kg.

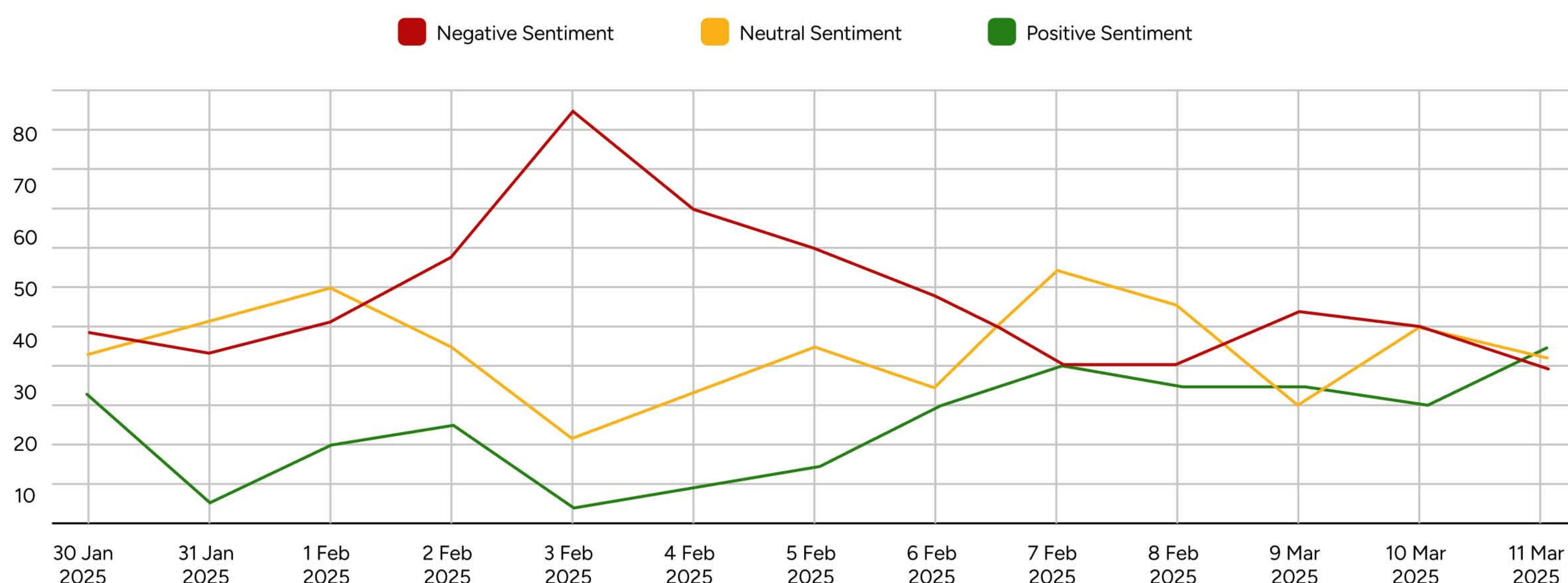


→ PEMBAHASAN

→ Tren Percakapan

Analisis dilakukan pada 30 Januari – 11 Februari 2025 dengan fokus pada reaksi masyarakat terhadap kebijakan pembatasan pengecer LPG 3 kg dan pencabutannya.

Gambar 2. Hasil Analisis Tren Sentimen

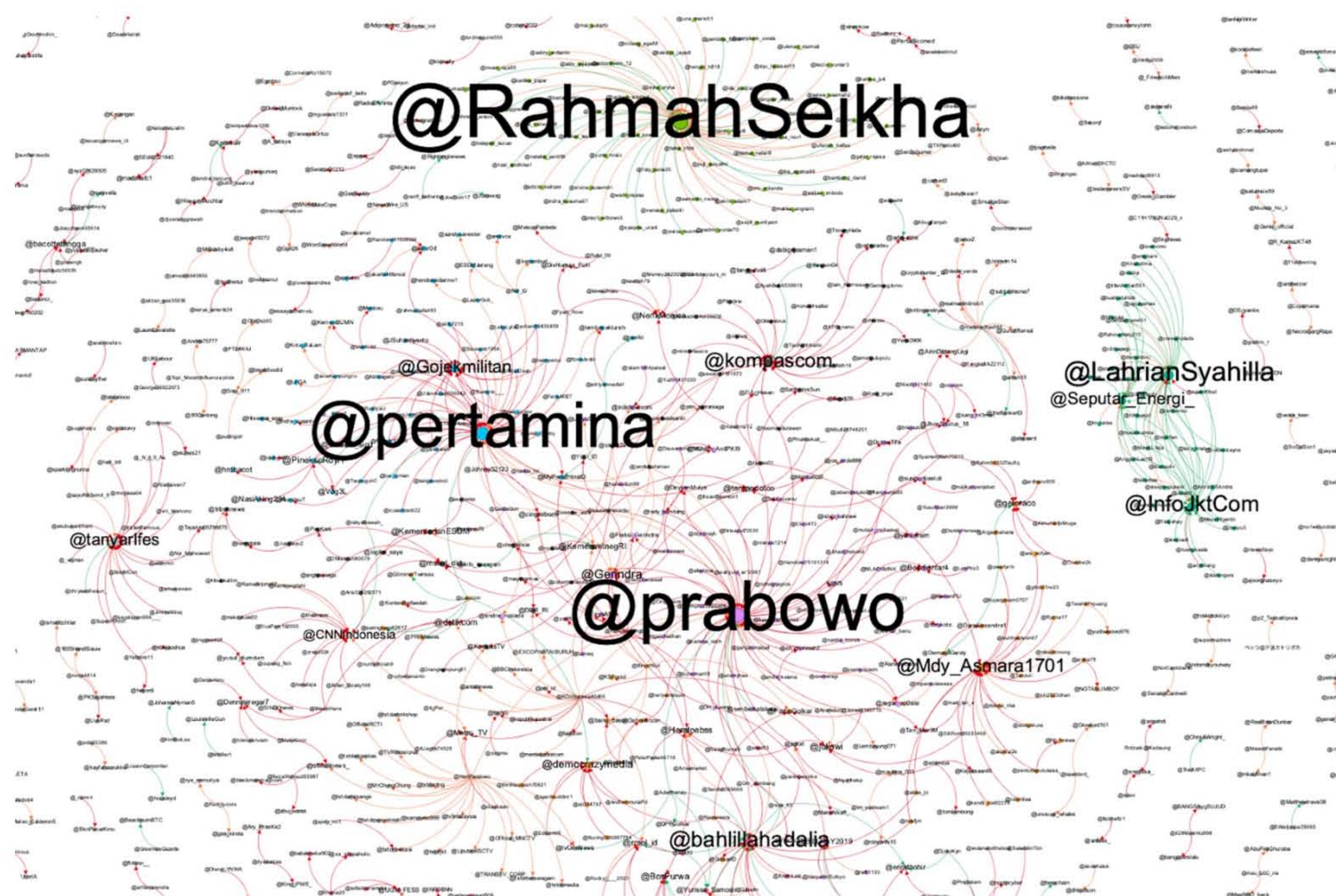


Sumber: Analisis oleh Data Scientist CfDS

Pada awal periode analisis (30 Januari-1 Februari), sentimen negatif dan netral cenderung stabil, sementara sentimen positif lebih rendah. Namun, setelah pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan pengecer pada 1 Februari, terjadi lonjakan tajam dalam sentimen negatif pada 3 Februari. Lonjakan ini dipicu oleh laporan kelangkaan LPG serta pemberitaan luas mengenai dampak kebijakan tersebut, yang mengharuskan masyarakat membeli LPG hanya di pangkalan resmi Pertamina. Setelah mencapai puncaknya, sentimen negatif mulai menurun hingga tanggal 7 Februari, seiring meningkatnya sentimen positif dan netral. Hal ini bertepatan dengan respons pemerintah yang mulai menangani permasalahan distribusi. Pada 4 Februari, pemerintah mengumumkan pencabutan kebijakan pembatasan pengecer, yang secara bertahap berkontribusi terhadap perbaikan sentimen publik. Menjelang akhir periode analisis (9-11 Februari), sentimen positif terus meningkat, bahkan melampaui sentimen negatif pada 11 Februari. Hal ini mengindikasikan bahwa langkah-langkah pemulihan distribusi mulai dirasakan oleh masyarakat.

→ Topic Spread and Political Buzzer

**Gambar 3. Visualisasi Jaringan Percakapan Publik
Terkait Kelangkaan Gas LPG 3 Kg**



Sumber: Analisis oleh Data Scientist CfDS

Visualisasi jaringan percakapan publik terkait kelangkaan LPG di atas memperlihatkan bahwa akun @pertamina dan @prabowo menjadi pusat perbincangan dan mendapat sentimen negatif yang dominan (ditunjukkan dengan warna merah). Sentimen negatif yang dominan mengindikasikan bahwa publik mengaitkan kedua akun tersebut dengan implementasi kebijakan yang dianggap bermasalah. Sentimen negatif yang terlihat dalam jaringan percakapan ini bisa berasal dari keluhan, kritik, atau ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan terkait distribusi LPG. Selain itu, dominasi warna merah menunjukkan bahwa opini negatif lebih luas tersebar dan memiliki resonansi yang lebih kuat dibanding sentimen lainnya.

Di sisi lain, sentimen positif (warna hijau) yang berdiri sendiri menunjukkan bahwa sentimen positif tidak menyebar secara organik ke dalam percakapan luas, melainkan hanya berputar dalam lingkup terbatas. Pola ini mengindikasikan adanya kemungkinan aktor-aktor yang secara aktif membangun narasi positif, namun gagal meresonansi dalam diskusi utama. Akun-akun dengan agenda spesifik (dikenal sebagai buzzer) berusaha membangun sentimen positif, tetapi karena tidak selaras dengan arus utama jaringan percakapan, narasi mereka justru membentuk klaster tersendiri yang terisolasi dari opini publik yang lebih organik.

Gambar 4. Thread dari Akun dengan Dugaan Agenda Tersendiri



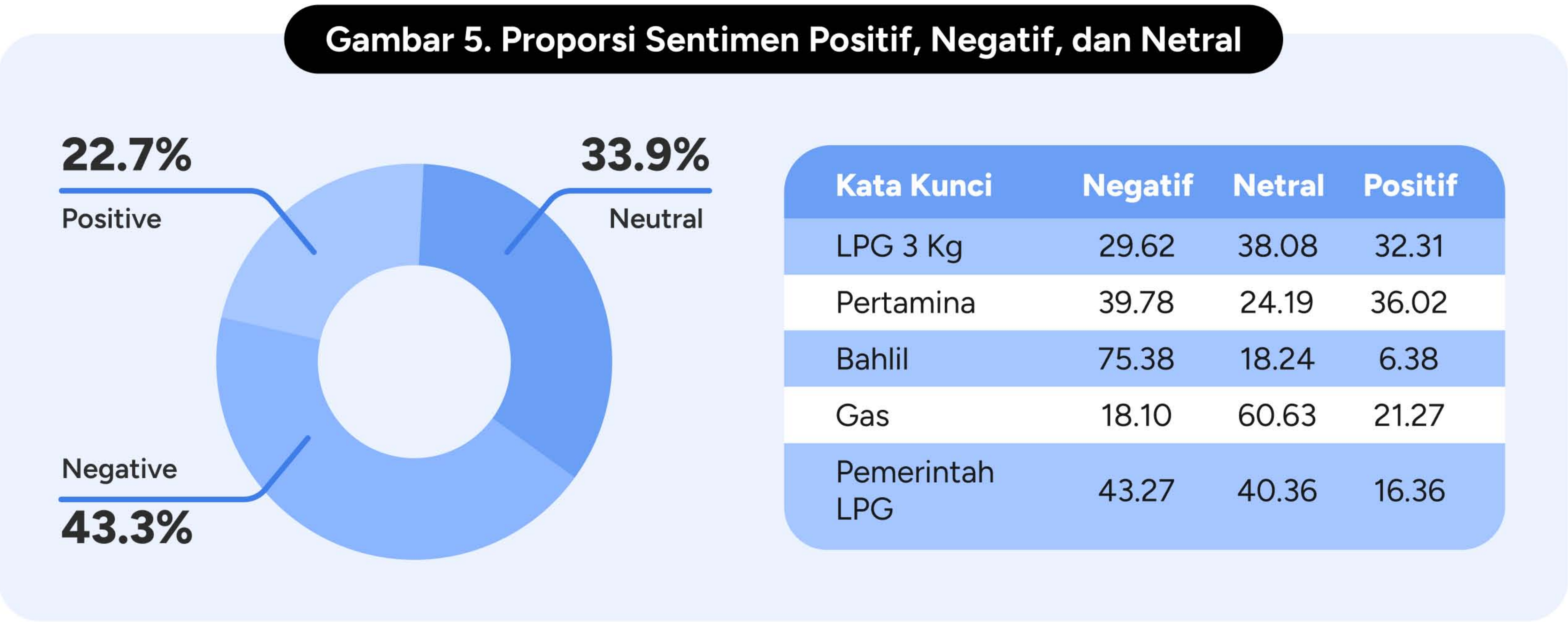
Sumber: Sumber: Sosial Media X

Melalui visualisasi jaringan percakapan, salah satu akun (pada bagian atas visualisasi) juga menarik banyak perhatian dan disebut berulang kali dalam jaringan percakapan dengan sentimen yang bervariasi, meskipun sedikit terpisah dari jaringan percakapan utama. Setelah ditelusuri lebih lanjut, akun tersebut termasuk salah satu yang aktif mengunggah cuitan positif terkait politik dan pemerintahan dengan jumlah view yang relatif tinggi (hingga 1.000+), serta memicu banyak respon dari pengguna lain. Pola interaksi yang sedikit terpisah dari jaringan utama memperkuat indikasi bahwa akun tersebut merupakan aktor yang memiliki agenda komunikasi tersendiri. Gambar 4 di atas merupakan contoh cuitan yang memiliki interaksi cukup banyak dari akun tersebut.



➔ **Sentiment Analysis**

Berdasarkan analisis sentimen pada kata kunci terkait kebijakan LPG 3 kg, opini masyarakat cenderung tersebar, dengan sentimen negatif yang paling mendominasi.



Sumber: Analisis oleh Data Scientist CfDS

Kebijakan LPG 3 kg ini mendapat lebih banyak kritik atau komentar negatif (43,38%) dibandingkan dukungan dan diskusi yang bersifat netral. Selain itu, kritik tertinggi ditunjukkan kepada Menteri Bahlil dengan dominasi sentimen negatif sebesar 75,38%, diikuti oleh kata kunci pemerintah dan Pertamina. Sementara itu, kata kunci “gas” lebih banyak dibahas secara netral yang menunjukkan fokus diskusi pada informasi teknis atau berita tanpa opini yang kuat.

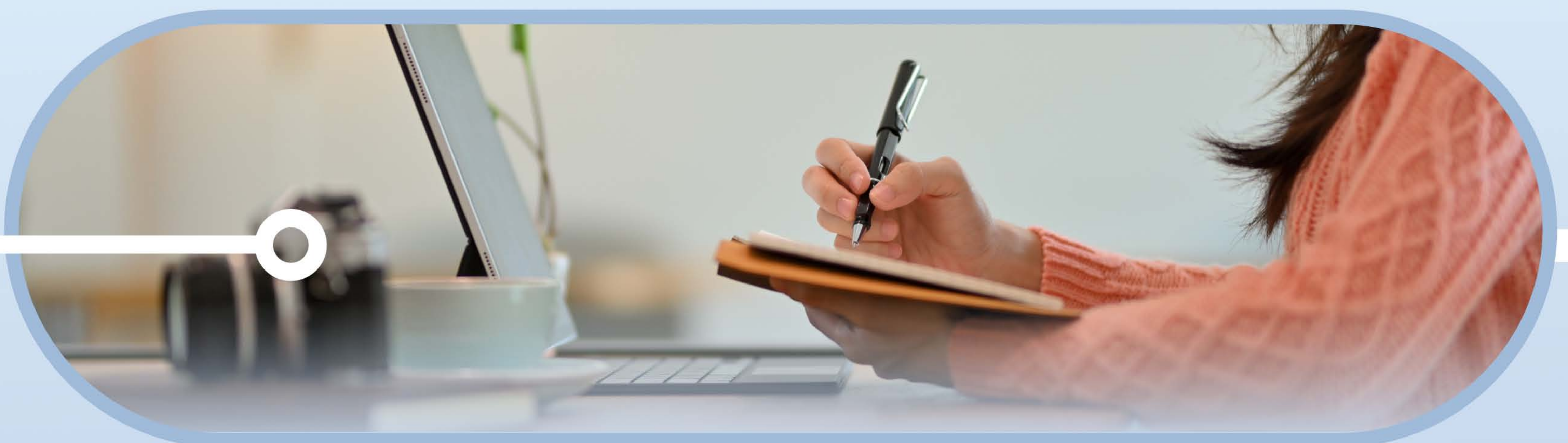


Gambar 6. Word Cloud Sentimen Positif

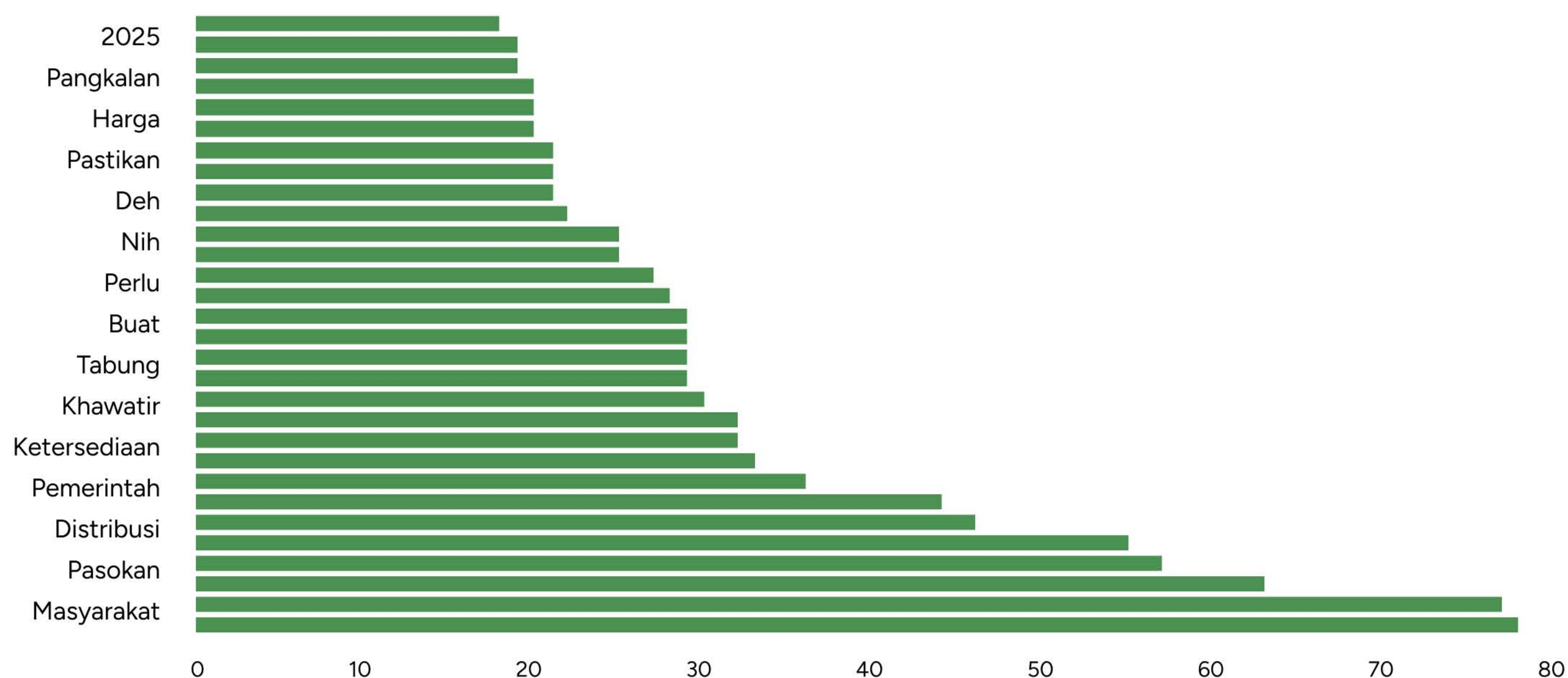


Sumber: Analisis oleh Data Scientist CfDS

Sentimen positif didominasi oleh optimisme terhadap ketersediaan pasokan dan peran pemerintah dalam menjamin distribusi yang aman. Kata-kata seperti "aman", "tetap", dan "makin" mencerminkan harapan masyarakat bahwa pasokan LPG akan tetap stabil. Selain itu, istilah "pemerintah," "distribusi," dan "pasokan" menunjukkan adanya apresiasi terhadap langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keberlanjutan LPG subsidi. Beberapa pengguna juga menyoroti pentingnya dukungan bagi UMKM serta perlunya langkah strategis dalam manajemen stok LPG.



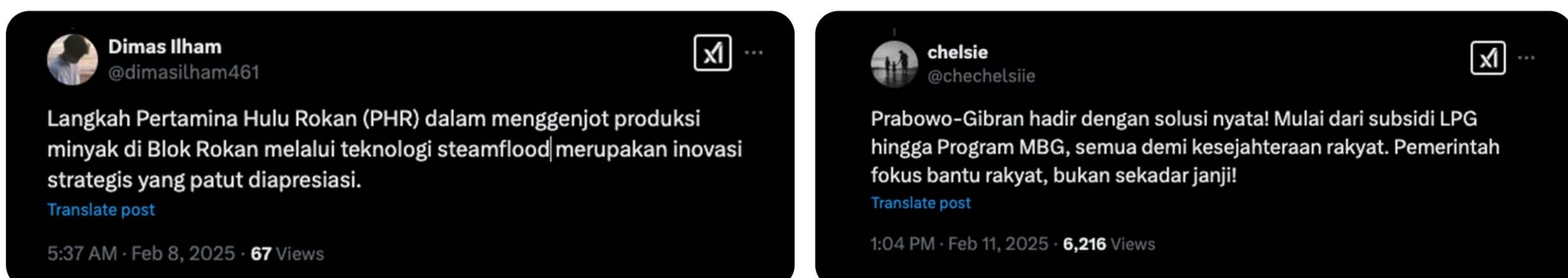
Gambar 7. Top 30 Kata dalam Sentimen Positif



Sumber: Analisis oleh Data Scientist CfDS

Dalam daftar 30 kata paling sering muncul pada sentimen positif, terlihat bahwa kata seperti “masyarakat”, “pasokan”, dan “distribusi” juga sering disebutkan, yang mencerminkan optimisme terhadap ketersediaan dan distribusi LPG.

Gambar 8. Tweet Sentimen Positif



Sumber: Sumber: Sosial Media X

Optimisme masyarakat terlihat dari tweet positif yang menyoroti keyakinan terhadap solusi nyata pemerintahan Prabowo-Gibran, seperti subsidi LPG dan program MBG untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, inovasi Pertamina Hulu Rokan (PHR) dalam meningkatkan produksi minyak melalui teknologi *steamflood* juga mencerminkan optimisme terhadap strategi energi nasional.

Gambar 9. Word Cloud Sentimen Negatif

Sentimen negatif dalam perbincangan publik mengenai kebijakan LPG 3 kg didominasi oleh kekecewaan dan kemarahan masyarakat terhadap pemerintah. Kata-kata seperti "pemerintah," "kebijakan," "pangkalan," dan "subsidi" menunjukkan bahwa kritik banyak diarahkan pada kebijakan distribusi dan pencabutan peran pengecer.

Gambar 10. Top 30 Kata dalam Sentimen Negatif

Kata	Frekuensi (Estimasi)
2025	18
Pangkalan	19
Harga	20
Pastikan	21
Deh	22
Nih	25
Perlu	28
Buat	29
Tabung	30
Khawatir	31
Ketersediaan	33
Pemerintah	36
Distribusi	46
Pasokan	57
Masyarakat	77

Analisis Sentimen Publik Terhadap Implementasi Kebijakan Tanpa Persiapan: Studi Kasus Larangan Pengecer LPG 3 KG

Selain kata-kata "pemerintah," "kebijakan," "pangkalan," dan "subsidi", istilah "beli," "harga," dan "bikin" juga menjadi kata-kata yang sering muncul dalam sentimen negatif, yang menandakan kekhawatiran terkait kenaikan harga serta kesulitan akses LPG bagi masyarakat kecil.

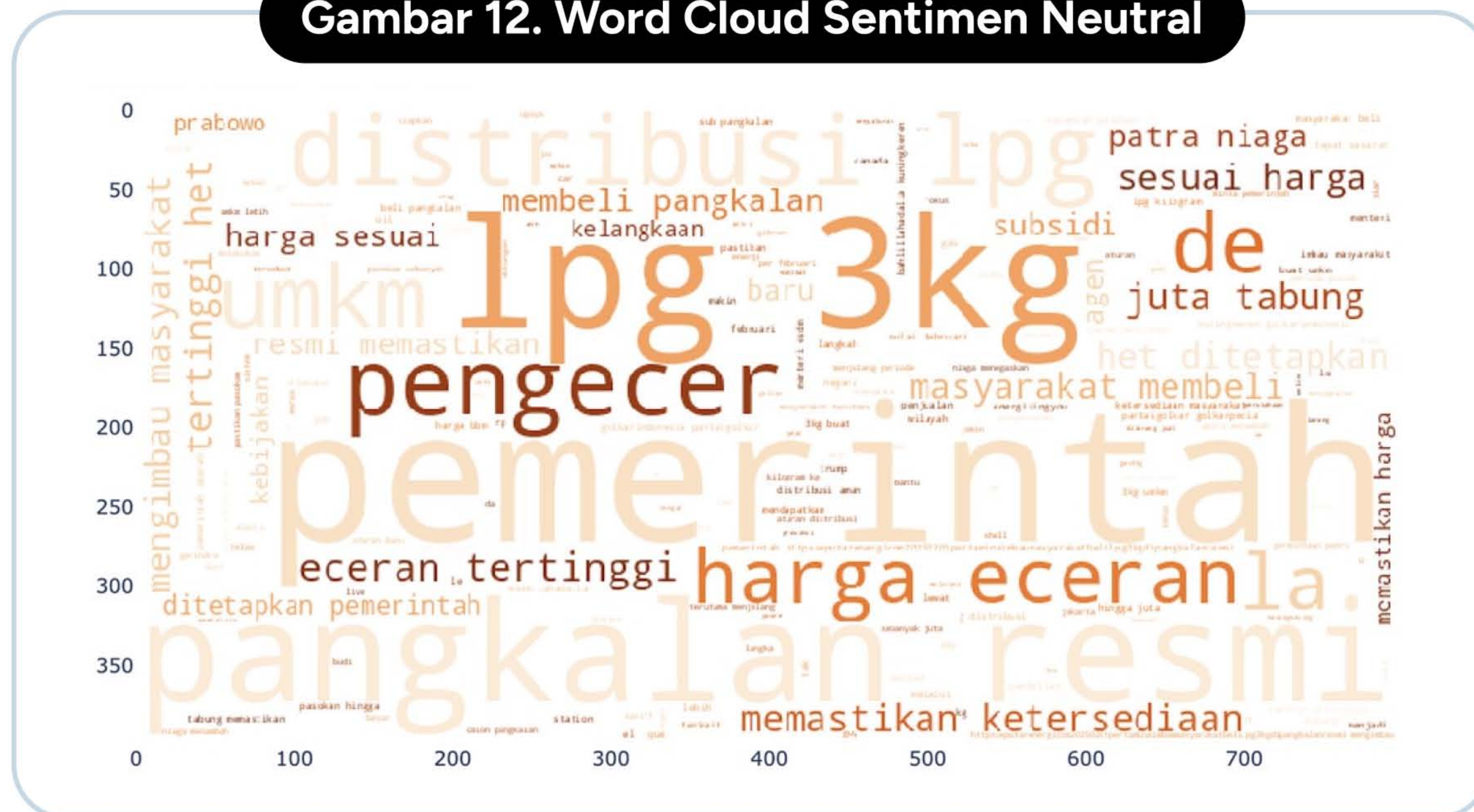
Gambar 11. Tweet Sentimen Negatif



Sumber: Sumber: Sosial Media X

Selanjutnya, berdasarkan unggahan populer di media sosial dengan sentimen negatif memperlihatkan ketidakpuasan terhadap keputusan pemerintah, dengan beberapa pihak menilai kebijakan tersebut tidak realistis dan menyulitkan. Kritik juga muncul terkait infrastruktur yang belum siap, sehingga banyak yang merasa kebijakan ini akan berdampak negatif pada rumah tangga dan usaha kecil.

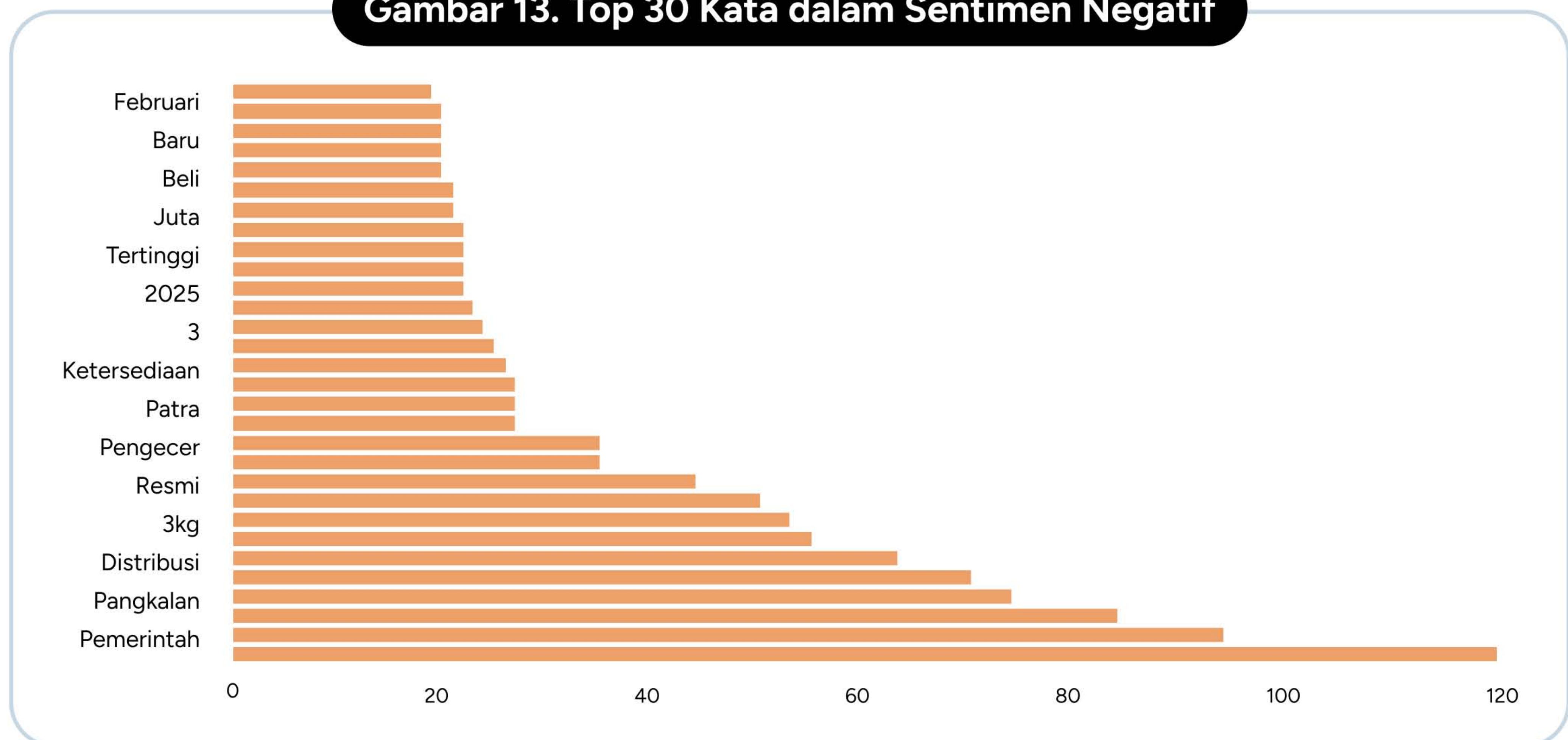
Gambar 12. Word Cloud Sentimen Neutral



Sumber: Analisis oleh Data Scientist CfDS

Analisis sentimen netral menunjukkan bahwa percakapan di media sosial terkait LPG 3 kg sebagian besar bersifat informatif, tanpa adanya kecenderungan emosi positif atau negatif yang kuat. Dalam Word Cloud pada Gambar 12, kata-kata seperti "pemerintah", "pengencer", "harga eceran", dan "pangkalan resmi" muncul dengan frekuensi tinggi, yang menunjukkan bahwa topik utama dalam kategori netral berkaitan dengan regulasi harga dan distribusi LPG 3 kg.

Gambar 13. Top 30 Kata dalam Sentimen Negatif



Sumber: Analisis oleh Data Scientist CfDS

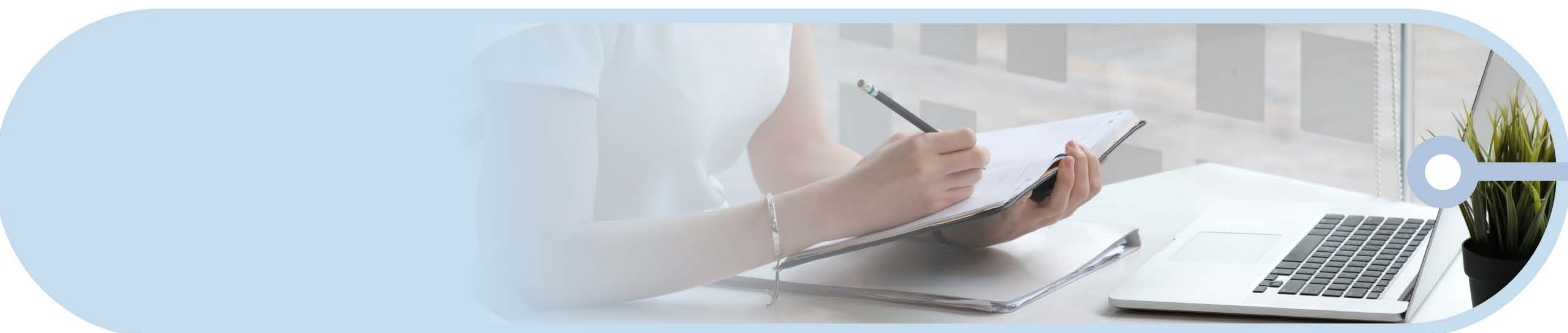
Selain itu, daftar 30 kata paling sering muncul dalam sentimen netral pada Gambar 13 semakin mengonfirmasi bahwa diskusi yang bersifat netral ini didominasi oleh informasi terkait kebijakan distribusi, regulasi harga, serta peran pangkalan dan pengecer dalam rantai distribusi LPG.

Gambar 11. Tweet Sentimen Negatif



Sumber: Sumber: Sosial Media X

Berdasarkan tweet populer, berapa pengguna membagikan detail tentang regulasi harga dan mekanisme distribusi di pangkalan resmi serta pengecer. Selain itu, ada pula yang berperan sebagai pengamat, menganalisis dampak kebijakan ini terhadap ketersediaan LPG bagi masyarakat dan UMKM. Diskusi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih luas tanpa kecenderungan opini yang terlalu positif atau negatif, serta menyoroti aspek logistik dan implementasi kebijakan di lapangan.





➔ **Strategi Kebijakan Berbasis Sentimen Publik dan Wawasan Akademik**

Hasil analisis menunjukkan bahwa sentimen negatif mendominasi respons publik terhadap implementasi kebijakan LPG yang diberlakukan pada 1 Februari lalu. Masyarakat menyampaikan kritik, keluhan, dan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap mendadak serta kurang berpihak pada kesejahteraan publik. Berbagai permasalahan, seperti sulitnya akses, antrean panjang, hingga munculnya korban jiwa, menjadi sorotan utama dan dikaitkan dengan pelaksanaan kebijakan yang dinilai tidak ideal. Hingga tiga hari setelah diterbitkan, kebijakan akhirnya dicabut, menandakan implementasinya tidak berjalan dengan optimal dan bahkan cenderung prematur.

Meskipun kebijakan telah dicabut, tren tetap menunjukkan bahwa sentimen negatif masih lebih dominan dibandingkan sentimen positif. Sentimen positif memang mengalami peningkatan seiring waktu, tetapi hal ini berkaitan dengan keterlibatan aktor-aktor tertentu yang memiliki agenda spesifik atau buzzer. Fenomena ini dijelaskan dalam studi terdahulu (Dey, Luceri and Ferrara, 2024), bahwa aktor berkepentingan juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan sentimen positif secara bertahap, meski resonansinya tetap terbatas di luar percakapan utama. Walaupun begitu, peningkatan sentimen positif tetap lebih rendah dibanding sentimen negatif, menunjukkan bahwa pencabutan kebijakan tidak secara signifikan mengubah persepsi publik terhadap kasus ini.

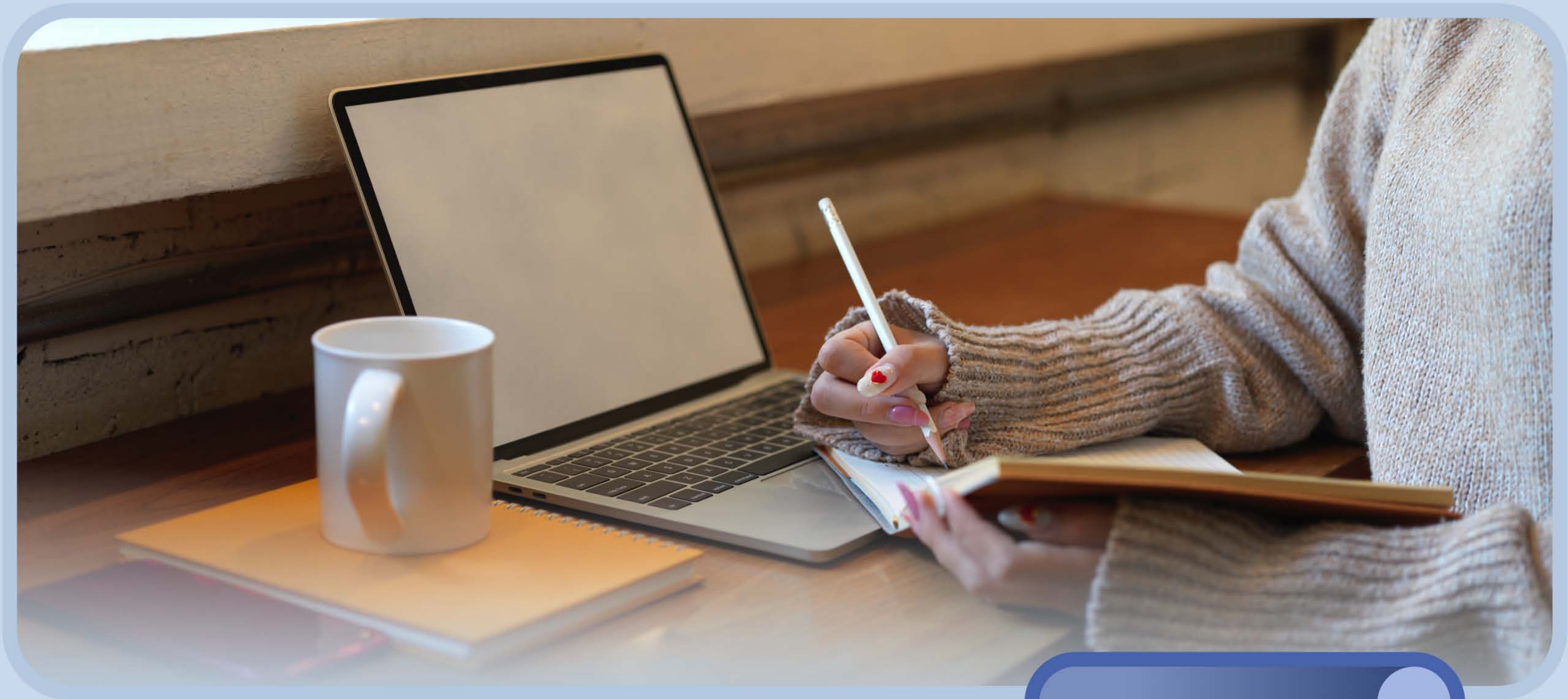
Lebih lanjut, sentimen negatif ini juga mengindikasikan ketidakpuasan masyarakat dan kekhawatiran terhadap kesejahteraannya akibat larangan pengecer LPG 3 kg. Oleh karena itu, perumusan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan publik dengan mempertimbangkan sentimen masyarakat dapat menjadi strategi yang lebih efektif untuk memastikan kebijakan di masa depan lebih matang serta optimal dalam pelaksanaannya.

Mengacu pada konsep implementasi kebijakan pada studi terdahulu, terdapat empat faktor yang dapat diadopsi sebagai strategi yang tepat dalam implementasi kebijakan kedepannya, yaitu kebijakan yang bebas ambiguitas, memiliki koordinasi yang baik, mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, dan tidak didominasi oleh kepentingan politik (OCP Policy Center, 2017; Judijanto, Yumame and Pugu, 2024).

Dalam konteks subsidi LPG 3 kg, penerapan keempat faktor ini menjadi krusial untuk memastikan implementasi kebijakan yang lebih efektif. Oleh karena itu, beberapa langkah strategis perlu dilakukan guna meningkatkan keberhasilan kebijakan di masa mendatang. Pertama, definisi masyarakat miskin atau penerima subsidi harus diperjelas agar distribusi lebih tepat sasaran dan tidak membuka celah penyalahgunaan. Kedua, koordinasi antara Kementerian ESDM dan presiden harus diperkuat guna menghindari keputusan yang terburu-buru dan mencegah pencabutan kebijakan dalam waktu singkat. Ketiga, pemerintah perlu mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dengan memastikan akses yang merata ke agen resmi sebelum melarang pengecer LPG 3 kg, sehingga dapat mencegah antrean panjang, ketimpangan distribusi, serta dampak negatif lainnya. Keempat, kebijakan harus diterapkan secara bertahap dengan uji coba atau skema transisi yang jelas agar masyarakat memiliki waktu untuk beradaptasi dan kebijakan tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Jika implementasi kebijakan nantinya mempertimbangkan keempat langkah di atas, maka regulasi Indonesia telah satu langkah lebih berorientasi pada kebijakan publik. Sangat diperlukan bagi pemerintah untuk mengidentifikasi potensi masalah sejak dini, menyesuaikan kebijakan dengan kondisi di lapangan, serta membangun kesiapan masyarakat agar transisi implementasi kebijakan dapat berjalan lebih lancar. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak sekadar menjadi keputusan yang harus direvisi dalam waktu singkat.





→ KESIMPULAN

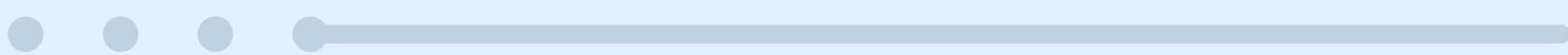
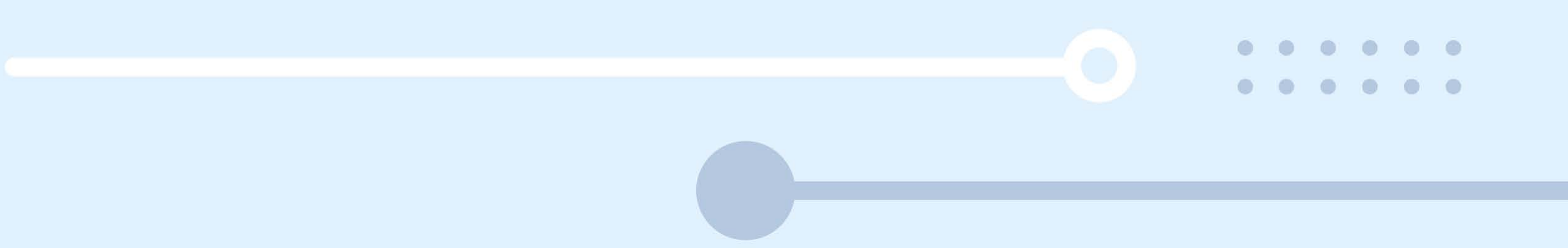
Temuan di atas menunjukkan bahwa dinamika sentimen publik memiliki peran dalam perubahan kebijakan pemerintah. Gelombang respons negatif yang muncul di media sosial setelah implementasi larangan pengecer LPG 3 Kg berkontribusi pada pencabutan kebijakan tersebut hanya dalam waktu tiga hari. Hal ini mengindikasikan bahwa reaksi masyarakat tidak dapat diabaikan dan dapat menjadi faktor penentu dalam keberlanjutan suatu kebijakan.

Lebih lanjut, cepatnya pencabutan kebijakan ini juga menegaskan bahwa implementasinya belum ideal atau tidak selaras dengan tuntutan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan yang lebih matang dan komunikasi kebijakan yang lebih efektif diperlukan agar kegagalan implementasi kebijakan serupa tidak berulang. Kemudian, kejadian ini juga menjadi bukti bahwa keberlanjutan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas.

→ DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, N.A. et al. (2021). Social Media Network Analysis (SNA): Identifikasi Komunikasi dan Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial Twitter. JURNAL MEDIA INFORMATIKA BU-DIDARMA, 5(4), p. 1422.
- BBC News. (2025). Larangan penjualan gas elpiji 3kg secara eceran 'matikan pengusaha kecil dan susahkan konsumen'. Tersedia dari: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c23nzy-jz8mko>. [Diakses pada 16 Februari 2025].
- Black, S. (2023). IMF Fossil Fuel Subsidies Data: 2023 Update. IMF Working Papers, 2023 (169), p.1.
- Budya, H. & Yasir Arofah, M. (2011). Providing cleaner energy access in Indonesia through the megaproject of kerosene conversion to LPG. Energy Policy, 39(12), 7575–7586. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.02.061>
- Detik. (2025). Pencarian Gas LPG 3 Kg yang Renggut Nyawa Tri Lestari. Tersedia dari: <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7764819/pencarian-gas-lpg-3-kg-yang-renggut-nyawa-tri-lestari>. [Diakses 16 Februari 2025].
- Dey, P., Luceri, L. and Ferrara, E. (2024). Coordinated Activity Modulates the Behavior and Emotions of Organic Users: A Case Study on Tweets about the Gaza Conflict. [Online] Available from: doi.org/10.48550/arXiv.2402.05873 [Diakses 16 Februari 2025].
- Fajar. (2025). Kelangkaan LPG 3 Kg Telan Korban Jiwa, Jhon Sitorus Sentil Prabowo dan Bahlil. Tersedia dari: <https://fajar.co.id/2025/02/05/kelangkaan-lpg-3-kg-telan-korban-jiwa-jhon-sitorus-sentil-prabowo-dan-bahlil/>. [Diakses 16 Februari 2025].
- Kementerian Keuangan. (2023). Kajian kebijakan subsidi LPG tabung 3kg tepat sasaran. Tersedia dari: <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2020/07/06/093356342653278-kajian-kebijakan-subsidi-lpg-tabung-3kg-tepat-sasaran>
- Judianto, L., Yumame, J., & Pugu, M.R. (2024). Implementation of public policy in improving public welfare. Jurnal Administrasi Negara.
- Kompas Media. (2025). Bahlil: Harga Gas 3 Kg Seharusnya Rp 15.000, tapi di Warung Bisa Jadi Rp 25.000. Tersedia dari: <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/02/04/13235691/-bahlil-harga-gas-3-kg-seharusnya-rp-15000-tapi-di-warung-bisa-jadi-rp>. [Diakses 16 Februari 2025].
- Kontan. (2025). Elpiji 3 Kg Langka, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Trending Topik di X. Tersedia dari: <https://nasional.kontan.co.id/news/elpiji-3-kg-langka-menteri-esdm-bahlil-lahadalia-trending-topic-di-x>. [Diakses 16 Februari 2025]
- Kumparan. (2025). Dibikin Mumet Kebijakan Gas Elpiji 3 Kg. Tersedia dari: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/dibikin-mumet-kebijakan-gas-elpiji-3-kg-24TW2NJ6U0I>. [Diakses 16 Februari 2025].



- 
- Media Indonesia. (2025). Gas Elpiji 3 Kg tak Lagi Dijual di Pengecer Mulai 1 Februari 2025, Simak Aturannya. Tersedia dari: <https://mediaindonesia.com/ekonomi/739719/gas-elpiji-3-kg-tak-lagi-dijual-di-pengecer-mulai-1-februari-2025-simak-aturannya>. [Diakses 16 Februari 2025].
- Mesagan, E. P., Alimi, O. Y., & Vo, X. V. (2022). The asymmetric effects of exchange rate on trade balance and output growth. *The Journal of Economic Asymmetries*, 26, e00272.
- Narasi TV. (2025a). Menteri Bahlil Minta Maaf Terkait Korban Meninggal Antrean LPG 3 Kg. Tersedia dari: <https://narasi.tv/read/narasi-daily/menteri-bahlil-minta-maaf-terkait-korban-meninggal-antrean-lpg-3-kg>. [Diakses 16 Februari 2025].
- Narasi TV. (2025b). Prabowo Perintahkan Bahlil Agar Pengecer Boleh Kembali Jual Elpiji 3 Kg. Tersedia dari: <https://narasi.tv/read/narasi-daily/prabowo-perintahkan-bahlil-agar-pengecer-boleh-kembali-jual-elpiji-3-kg>. [Diakses 16 Februari 2025].
- OCP Policy Center. (2017). Policy Implementation – A synthesis of the Study of Policy Implementation and the Causes of Policy Failure.
- Sahoo, A. et al. (2023). Comparative Analysis of BERT Models for Sentiment Analysis on Twitter Data. In: 2023 9th International Conference on Smart Computing and Communications (ICSCC). Kochi, Kerala, India: IEEE, pp. 658–663.
- Sketsa Nusantara. (2025). Diduga Kelelahan Mencari Gas LPG 3 Kg Potret Bapak Ini Viral dan Jadi Sorotan, Warganet Ramai Tag Akun Bahlil Lahadalia dan Gerindra. Tersedia dari: <https://www.sketsanusantara.id/news/103924953/diduga-kelelahan-mencari-gas-lpg-3-kg-potret-bapak-ini-viral-dan-jadi-sorotan-warganet-ramai-tag-akun-bahlil-lahadalia-dan-gerindra?page=2>. [Diakses 16 Februari 2025].
- Tempo. (2025). Penjelasan Terbaru Bahlil Tentang Kisruh Pelarangan Penjualan LPG 3 Kg di Pengecer. Tersedia dari: <https://www.tempo.co/politik/penjelasan-terbaru-bahlil-tentang-kisruh-pelarangan-penjualan-lpg-3-kg-di-pengecer-1202724>. [Diakses 16 Februari 2025].
- TNP2K. (2025). Policy Paper: Reformasi Kebijakan Subsidi LPG Tepat Sasaran. Tersedia dari: https://www.tnp2k.go.id/download/28133Buku_Policy%20Paper%20Reformasi%20Kebijakan%20Subsidi%20LPG%20Tepat%20Sasaran.pdf. [Diakses 14 Februari 2025].
- Wiratmadja, I. I., Govindaraju, R., & Handayani, D. (2016). Innovation And Productivity In Indonesian It Clusters: The Influence Of External Economies And Joint Action. *International Journal Of Technology*, 7(6).
- 

ABOUT CFDS

Center for Digital Society (CfDS) is the research center established by the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada. The institution is created under the concern over the contemporary dynamics of socio-political condition of the world that is accentuated by the impeccable influence of information technology. The phenomenon triggers the new patterns and complexities in the society, and thus requires new approaches in managing such complexities.

CfDS pledged to delve more on the study of contemporary digital society, including related issues surrounding the topic; such as the issues of smart city and urban development. The emphasis is then put on the utilization of technology to shape the society in becoming digitalized, as well as to bring solvency to social issues.

VISION

Solving Social Problem and Accelerating Prosperity through Indonesia Digital Society

ACTIVITIES

- Research and development
- Dissemination and Publication
- Educational and Policy Advocacy



 facebook.com/cfds.ugm

 [@cfds_ugm](https://line.me/@cfds_ugm)

 [Center for Social Society \(CfDS\)](https://in.linkedin.com/company/Center%20for%20Social%20Society%20(CfDS))

 [@cfds_ugm](https://twitter.com/cfds_ugm)

 [Cfds_ugm](https://www.instagram.com/Cfds_ugm)

 [CfDS UGM](https://www.youtube.com/CfDS%20UGM)

